

---

# Nasionalisme dan Gagasan Kebangsaan Indonesia Awal: Pemikiran Soewardi Suryaningrat, Tjiptomangoenkusumo dan Douwes Dekker 1912-1914

**Wildan Sena Utomo**

*Mahasiswa S2 Jurusan Sejarah Program Cosmopolis, Leiden*

## **Abstrak**

*Artikel ini membahas mengenai nasionalisme dan gagasan kebangsaan Indonesia awal yang dicetuskan oleh tiga serangkai Soewardi Suryaningrat, Tjiptomangoenkusumo dan Douwes Dekker yang tergabung dalam Indische Partij. Meskipun usia partai ini sebentar, tapi gagasan yang disebarkan trio IP ini memberikan pondasi dasar terhadap gagasan Indonesia. Gagasan mereka tentang bangsa pada masanya telah melampaui pemikiran politik zaman itu. Pemakaian istilah “Indonesia” adalah kata yang dipopulerkan pertama kali secara politik oleh pemikir dalam kelompok ini pada saat pembuangan di Belanda. Gagasan ketiga pemikir ini memberikan suatu jalan terhadap kemunculan konsepsi kebangsaan Indonesia yang lebih modern pada tahun 1920an.*

**Kata kunci:** *nasionalisme, bangsa, Indonesia, Indische Partij*

## **Pengantar**

Barangkali ada benarnya pernyataan sejarawan Inggris, Christopher Bayly, yang mengatakan bahwa “nasionalisme agak sulit untuk mati” (Bayly, 2004: 199). Di tengah batas-batas wilayah negara-bangsa yang dilampaui oleh transformasi teknologi yang begitu cepat sehingga sekat negara dan bangsa sebetulnya oleh beberapa pihak dikatakan tidak relevan lagi. Oleh sebab itu, untuk mengikuti perubahan zaman sekarang, seseorang tidak lagi hidup sebagai bagian dari sebuah negara tertentu – atau mungkin bangsa tertentu. Pada tahap inilah, pernyataan Eric Hobsbawm dalam penutup karyanya *Nations and Nationalism since 1780* begitu relevan. Hobsbawm mengatakan bahwa negara-bangsa dan bangsa di akhir abad ke-20 sedang bergerak mundur, dihadapan dengan, bertahan terhadap, beradaptasi dengan, terserap atau tersingkir dari, penstrukturan kembali dunia secara supranasional (Hobsbawm, 1992: 191).

Maka nasionalisme tidak mustahil untuk mengalami kemunduran seiring dengan kemunduran negara-bangsa. Hobsbawm menambahkan “tanpa negara-bangsa ini maka menjadi orang Inggris atau Irlandia atau Yahudi atau gabungan kesemuanya hanyalah salah satu cara rakyat menyatakan perbedaan mereka ditengah rakyat lain” (Hobsbawm, 1992: 192). Tapi, kenyataannya nasionalisme dan bangsa tidak pernah mati. Menurut Ben Anderson “kenyatannya ‘era berakhirnya nasionalisme’ yang sudah lama diramalkan, tak jua nampak di cakrawala, justru nilai kenasionalan adalah nilai yang paling absah secara universal dalam kehidupan politik zaman kita” (Anderson, 2008: 4). Dia tetap hidup karena nasionalisme dan bangsa adalah dan ternyata “dibutuhkan” sebagai sebuah identitas sampai saat ini (Kartodirdjo, 1994: 14-17). Identitas nasional membantu kita untuk mengidentifikasi dan menempatkan kita di peta dunia, dia mengatakan siapa

kita, darimanakah kita dan apa yang sudah kita lakukan. Dan walaupun bangsa-bangsa di dunia sekarang sudah lahir tetapi bangsa adalah “pembangunan yang tidak akan pernah selesai”. Jadi sebetulnya, kedua konsepsi tersebut begitu lentur dan akan disesuaikan dalam episode waktu yang terus berjalan – baik dalam konteks positif dan negatif, sosio-kultural dan politis.

Perdebatan mengenai nasionalisme dan relasinya terhadap bangsa merupakan studi yang masih bergelora di Indonesia dewasa ini. Namun, masih jarang akademisi, intelektual dan aktivis di Indonesia yang menelusuri asal-usul munculnya gagasan kebangsaan dan relasinya dengan nasionalisme secara komprehensif. Wang Gungwu dan beberapa ahli mengenai sejarah bangsa di Asia Tenggara telah menginisiasi sebuah konferensi penting mengenai *nation-building* di Asia Tenggara dan relevansinya pada masa kini, “Nation-building Histories: Thailand, Philippines, Indonesia, Malaysia and Singapore” di Singapura tahun 2002 – kemudian diterbitkan menjadi buku. Konferensi ini merupakan “kelanjutan” dari konferensi internasional sejarawan se-Asia (IAHA) di Bangkok tahun 1996 yang salah satu panelnya mendiskusikan tentang *nation-building* di Asia Tenggara. Pada bagian Indonesia, Taufik Abdullah sebagai sejarawan terkemuka Indonesia menulis mengenai sejarah pembangunan bangsa Indonesia dalam perspektif demokrasi (Abdullah, 2009). Kemudian, pada konferensi 2002 yang diterbitkan menjadi buku, Anthony Reid menulis tentang sejarah pembangunan bangsa dalam kacamata sejarah kemerdekaan Indonesia (Reid dalam Gungwu, (?): 69-91.

Kedua usaha itu merupakan usaha penting dalam menuliskan sejarah gagasan kebangsaan Indonesia, tapi sampai saat ini masih ada banyak pihak mengkaitkan gagasan kebangsaan Indonesia secara jelas dengan organisasi Boedi Oetomo (BO) dan Sarekat Islam (SI) awal. Padahal dua organisasi tersebut

belum mendeskripsikan konsepsi bangsa dengan jelas ataupun sebagai “permulaan” tapi memang BU mempunyai karakteristik nasionalisme yang berlandaskan etnis dan SI mempunyai karakteristik nasionalisme yang berlandaskan anti-penindasan. Justru konsepsi mengenai bangsa dalam dua pengertian tersebut muncul dari gagasan trio Indische Partij: Douwes Dekker, Tjiptomangoenkusumo dan Soewardi Suryaningrat. Uraian ini ingin bermaksud membedah bagaimana konsepsi gagasan kebangsaan yang mereka pikirkan dan sebarakan, apa yang mempengaruhi gagasan tersebut dan sejauh manakah pemikiran mereka berpengaruh.

### **Nasionalisme dan Bangsa: Sebuah Introduksi**

Dalam sejarah pemikiran, konsepsi tentang nasionalisme erat berelasi dengan bangsa dan negara. Tiga konsep ini tidak bisa dipisahkan dan saling terikat satu sama lain, terutama nasionalisme dan bangsa. Pertama-tama adalah nasionalisme, konsep ini meskipun tidak pernah melahirkan pemikir besar seperti demokrasi, liberalisme ataupun sosialisme namun melahirkan berbagai peristiwa penting dalam sejarah seperti revolusi-revolusi, perang besar dan yang terpenting adalah bangsa-bangsa baru. Banyak para akademisi yang menekuni masalah nasionalisme dan bangsa berpendapat bahwa nasionalismelah yang melahirkan bangsa – dan ini masih diperdebatkan. Teoritikus nasionalisme dan bangsa yang berpengaruh, Ernest Gellner mengatakan bahwa bangsa tidak membuat nasionalisme, nasionalisme yang mendefinisikan dan membuat bangsa “*nationalism invents nations where they do not exist – but it does need some pre-existing differentiating marks to work on, even if, as indicated, there are purely negative*” (Gellner, 1964: 168). Pandangan ini kemudian diperluas olehnya dalam karya fenomenalnya *Nations and Nationalism*, ia berpendapat nasionalisme

adalah *political principle*, “sebuah prinsip yang beranggapan bahwa unit politik dan nasional hendak selaras”, teori tentang legitimasi politik dimana “*ethnic boundaries should not cut across political ones*” (Gellner, 1983: 1).

Pandangan ini tidak berbeda dengan beberapa pandangan pemikir teori nasionalisme dan bangsa lainnya seperti Eric Hobsbawm, Anthony D. Smith, John Breuilly, Elie Kedourie. Hobsbawm mengatakan bahwa nasionalisme adalah “program politik” yang menkonstruksi dan mengarsiteki bangsa. Lewat karyanya bersama Terence Ranger mengenai “*invented tradition*”, kita bisa mengerti bahwa bangsa berhubungan dengan *national tradition*, dan *national tradition* merupakan salah satu dari tradisi yang ditemukan (Hobsbawm dan Ranger (ed.), 1983). Sedangkan, Smith dalam mendiskusikan masalah ini lebih melihat kepada “*the role of the past*” dalam kreasi “*the present*”. Dengan dua konsep ini, Smith mengatakan bahwa para nasionalis mempunyai peran vital dalam mengkonstruksi bangsa sebagai *political archeologists*, mereka merediskoveri dan mereinterpretasi tradisi komunal dalam rangka menumbuhkan kembali komunitas (Smith, 1994: 18-19). Kenyataannya, memang tidak ada nasionalisme tanpa unsur politik dan tidak ada bangsa yang lahir tanpa politik yang terlibat didalamnya. G. O. Nodia mengatakan:

“Nasionalisme adalah sekeping mata uang yang mempunyai dua sisi – politik dan etnik. Kenyataannya nasionalisme selalu mengandung aspek politik dan aspek etnik. Ide kebangsaan adalah ide politik dan tidak ada nasionalisme tanpa unsur politik. Tetapi, substansinya sama saja dengan etnik. Hubungannya dapat dinyatakan sebagai satu kesatuan dari satu jiwa politik yang menggerakkan satu tubuh etnik” (Nodia, 1992: 3-22).

Selain nasionalisme, uraian ini akan banyak membahas mengenai bangsa. Bangsa menurut Charles Tilly adalah “sebuah kata yang paling membingungkan dan tendensius

di dalam kosakata politik” (Tilly (ed.), 1975: 6). Konsepsinya terus diperdebatkan sampai saat ini karena sebetulnya tidak ada konsepsi bangsa yang benar-benar bisa mewakili seluruh karakteristik bangsa di seluruh dunia. Ben Anderson menggarisbawahi hal ini menurutnya “bangsa yang paling besar pun, memiliki perbatasan yang pasti meski elastis, di luar perbatasan itu adalah bangsa-bangsa lain, tak ada satupun bangsa membayangkan dirinya meliputi seluruh umat manusia di bumi” (Anderson, 2008: 10). Meskipun secara general memang ada beberapa kesamaan antara karakteristik bangsa yang satu dengan yang lain. Tapi ada beberapa kekhususan dari keumuman-keumuman itu. Problem yang sering mengemuka adalah kesulitan orang-orang dalam membedakan antara bangsa dengan etnis (Smith, 2003: 15).<sup>1</sup> Kesulitan-kesulitan seperti itu merupakan satu hal diantara hal lainnya ketika melakukan studi tentang bangsa, maka tidak aneh ketika terus muncul studi yang baru mengenai sebuah bangsa ketika ditemukan perbedaan partikularistik – dan tentunya pendekatan yang berbeda. Di dalam literatur mengenai nasionalisme dan bangsa Hobsbawm membaginya kedalam dua bagian: yang tradisional dan modern.<sup>2</sup> Sedangkan Smith melihatnya secara berbeda, dia membagi ke dalam berbagai perspektif diantaranya primordialis, parenialis, modernis, etno-simbolisme dan posmodernis (Smith, 1998).

1 Smith membedakan bangsa dan etnis sebagai berikut: bangsa sebagai suatu komunitas manusia yang memiliki nama, yang mempunyai kesamaan *historic territory* serta memiliki memori sejarah dan mitos publik yang sama, budaya publik bersama, perekonomian tunggal dan hak serta kewajiban bersama bagi semua anggotanya. Sedangkan etnis adalah suatu unit populasi manusia yang memiliki nama memiliki mitos leluhur bersama kenangan bersama, satu atau beberapa budaya bersama, mempunyai hubungan dengan *historic territory* dan solidaritas tertentu, paling tidak diantara elit-elitnya.

2 Diantaranya yang tradisional atau peletak dasar seperti Ernest Renan, *Qu'est que c'est une Nation?* dan Hans Kohn, *The Idea of Nationalism* yang modern beberapa diantaranya seperti Benedict Anderson, *Imagined Communities* Ernest Gellner, *Nations and Nationalism* dan Anthony D. Smith, *Theories of Nationalism*.

Berdasarkan filologi pengertian pertama dari bangsa menunjukkan asal-usul atau keturunan atau mengutip kamus Perancis kuno: *'naissance, extraction, rang'*, yang mengutip kata-kata Froissart *"je fus retourne au pays de ma nation en la conte de Haynnau"* (saya kembali ke tanah kelahiran saya di wilayah Hainault) (Hobsbawm, 1992: 15). Terminologi bangsa awalnya digunakan untuk kelompok famili, perluasan dari itu untuk kelompok atau orang asing yang mempunyai tempat kelahiran yang sama (Miller, 1995: 28). Tahun 1460, Fortescue mengatakan bahwa Scot, Spaniard adalah sebuah bangsa. Pada perdebatan mengenai persatuan antara Skotlandia dan Kerajaan Inggris tahun 1603, keduanya menyatakan sebagai bangsa yang berbeda. Pada tahun 1701, Defoe pada sebuah puisinya menyatakan bahwa bangsa adalah Romawi, Saxon, Norman, Danes, dan banyak orang yang mengidentifikasi sebagai dan mempunyai kontribusi kepada "keanekaragaman" sebagai orang Inggris (Miller, 1995: 28). Sebelum Revolusi Perancis, Johann Gottfried Herder menulis tentang nasionalisme tahun 1774 – walaupun begitu Herder tidak begitu berbeda dalam mendefinisikan nasionalisme dan chauvinisme. Herder menggunakan konsep *volck* (rakyat) dalam pengertian bangsa – seringkali dipertukarkan, sebagai sebuah komunitas dalam pengertian luas yang hidup dalam sebuah wilayah. Pada abad ke-18 definisi tentang bangsa tidak hanya berarti tentang asal-usul, Revolusi Perancis membawa pengaruh besar bahwa bangsa sama dengan "kedaulatan" dan akhir abad ke-18 definisi keduanya berdifusi (Dann dan Dinwiddy (ed.), 1998: 3).

Sebagai sebuah konsepsi, menurut Hobsbawm nasionalisme dan bangsa adalah sebuah konsepsi historis yang masih baru. Hobsbawm, Gellner, Anderson menekankan pada unsur modernitas dalam relasi antara nasionalisme dan pembentukan bangsa. Hobsbawm dalam babnya *The Nations as*

*Novelty* melihat karakteristik dasar dari bangsa modern dan segala yang terkait dengannya adalah modernitasnya (Hobsbawm, 1992: 14). Penelusuran terhadap beberapa kamus dilakukan untuk menguji tesis ini, Hobsbawm mengatakan:

"Dalam kamus *Royal Spanish Academy* sebelum tahun 1884 terminologi negara, bangsa dan bahasa dalam pengertian modernnya belum muncul. Sebelum tahun 1884, kata *nacion* berarti suatu kumpulan penduduk dari suatu propinsi, suatu negeri atau suatu kerajaan dan juga orang asing, tetapi sekarang kata itu diartikan sebagai suatu negara atau badan politik yang mengakui suatu pusat pemerintahan bersama yang tertinggi serta wilayah yang dikuasai negara tersebut dan penduduknya, dipandang sebagai suatu kesatuan. *Nacao* dari *Enciclopedia Brasileira Merito* (edisi terbaru) adalah komunitas warganegara dari suatu negara, hidup dibawah pemerintahan yang sama dan memiliki kepentingan bersama... Selain itu dalam kamus *Spanish Academy* versi terakhir dari bangsa tidak ditemukan hingga tahun 1925, saat digambarkan sebagai "kollektivitas dari orang-orang yang memiliki asal-usul suku yang sama, pada umumnya mempunyai bahasa yang sama dan tradisi bersama". Karya besar linguistik lainnya, *New English Dictionary* menyatakan tahun 1908, pengertian lama dari kata bangsa adalah menggambarkan kesatuan etnik tapi penggunaan baru-baru ini lebih menekankan gagasan persatuan dan kemerdekaan politik" (Hobsbawm, 1992: 14-15, 18).

Dalam melihat asal-usul bangsa modern Ben Anderson memiliki analisis menarik yaitu melihat bagaimana kapitalisme cetak mempengaruhi gagasan pembayangan bangsa modern. Dia menyatakan bahwa "pertindihan antara kapitalisme dan teknologi cetak mencetak dengan keragaman fatal bahasa manusia telah menciptakan kemungkinan lahirnya bentuk baru komunitas berbayang" (Anderson, 2008: 69). Sedangkan Gellner

melihat bahwa nasionalisme dan bangsa lahir dari transisi masyarakat agraris ke masyarakat industri. Di dalam masyarakat agraris stratifikasi masyarakat yang ketat kesulitan melahirkan kemungkinan pembentukan satu kebudayaan yang homogen untuk semua anggota. Sebaliknya, modernitas membutuhkan homogenitas budaya untuk bersatu, dalam sifatnya ia *fluid, mobile, constantly changing*, dimana individu mesti berkomunikasi dengan komunitas lain yang belum diketahuinya, tidak seperti masyarakat pra-modern yang hierarkis masyarakat modern begitu egaliter (Gellner, 1983: 19-50). Modernitas dalam pertumbuhan industri membutuhkan baik kemudahan mengalir yang tersebar luas dan homogenitas terpola, mobilitas individu dikombinasikan dengan standar kultural. Ini bisa dicapai ketika terbentuk kompetensi yang seragam, warga negara yang disubsitusikan dan hal ini gilirannya membutuhkan *large public mass education system* dan dikontrol oleh negara (Smith, 1994: 35). Hal ini hanya bisa bermula dan direalisasikan ketika modernitas lahir, oleh sebab itulah mengapa era modern secara otomatis adalah era dari lahirnya nasionalisme.

Setelah terjadinya Revolusi Amerika dan Perancis di Eropa yang menempatkan konteks bangsa ke dalam nafas demokratik-revolusioner, berkembang suatu gelombang baru bangsa atas nama prinsip nasionalitas dari sekitar tahun 1830. Terjadi dua ketersaling-hubungan yang menyebabkan krisis dunia, dalam tahun 1780-1815 dan 1848-1865, memberikan daya pendorong untuk memperlakukan identitas nasional (Bayly, 2004: 205). Penaklukan Napoleon di Eropa membangkitkan identitas nasional di Jerman, Italia dan Rusia. Secara sama, invasi Rusia dan Perancis membuat Turki, Mesir dan beberapa negara Afrika Utara sadar akan kebutuhan untuk mereorganisasi masyarakatnya. Dua generasi berikutnya, Perang Eurasia pada pertengahan abad ke-19 meyakinkan elit Tokugawa di Jepang untuk memperkuat diri. Di India, tahun

1857 terjadi pemberontakan atas Kerajaan Inggris yang mempertimbangkan kembali status di dalam kerajaan (*ibid.*). Di Eropa, keseimbangan kekuatan menjadi sedemikian berubah semenjak muncul dua kekuatan besar yang didasarkan atas prinsip nasional, yaitu Jerman dan Italia, pembagian sepertiga Eropa atas dasar yang sama (Austria-Hongaria setelah tahun 1867), lalu pengakuan atas wilayah politik kecil sebagai negara merdeka yang menuntut status baru sebagai rakyat merdeka berdasar kebangsaan, dari Belgia di sebelah barat sampai negara-negara pewaris Ottoman di Eropa Tenggara (Yunani, Serbia, Rumania dan Bulgaria) dan dua pemberontakan rakyat Polandia yang mendorong kembali menjadi negara-bangsa (Hobsbawm, 1992: 23). Bisa dikatakan abad ke-19 merupakan periode penting bagi pembentukan bangsa-bangsa di Eropa.

Di negara-negara jajahan, di Afrika dan Asia situasinya berbeda. Gagasan nasionalisme dan bangsa di Afrika dan Asia munculnya belakangan terutama pada awal dan pertengahan abad ke-20 setelah bergelora di Eropa pada abad ke-18 dan 19. Menurut Wang Gungwu, hampir semua negara diluar Amerika dan Eropa, “bangsa” adalah *a twentieth century enterprise* (Gungwu (?): 3). Dan membicarakan nasionalisme dan bangsa di Asia tidak bisa dilepaskan dari negara kolonial dan kolonialisme.

### **Kolonialisme, Nasionalisme dan Bangsa: Komparasi dan Penilaian**

Setelah kemunculan gelombang baru nasionalisme kerakyatan sejak tahun 1820an di Eropa yang banyak dipengaruhi oleh Revolusi Perancis dan Amerika, negara imperium macam Inggris agak was-was dengan spiritnya yang bisa mempengaruhi situasi negara jajahannya. Inggris lalu mengadakan sebuah usaha, dikatakan oleh Ben Anderson sebagai “nasionalisme resmi”, yaitu merger dengan niat menyatukan bangsa dengan kerajaan dinastik

(Anderson, 2004: 31). Inggris menginginkan kawasan *periphery*, penduduk India, untuk mengikuti asimilasi politik, sosial dan budaya ala *metropole*, Inggris. Tapi malahan kontradiksi yang muncul dari nasionalisme resmi Inggris akibat kesusahannya dalam dua hal yakni ketidakmampuannya untuk menampung dan membaurkan antara bangsa dan imperium. Sebab sedikit sekali diantara penduduk-penduduk yang ditaklukan mempunyai keterikatan dengan kebahasaan, kebudayaan, atau bahkan politik dan ekonomi dengan metropolisnya (Anderson, 2004: 140).

Pada hampir semua kekuatan imperial Eropa, ada dua cara untuk menciptakan warga negara, “teritori bangsa” keluar dari negara kolonial. Pertama adalah mengikuti pola awal dari akhir abad pertengahan di Eropa dalam membangun bangsa dengan merekonstruksi “*the major ethnic core*” dan mengintegrasikan kultur historisnya kepada kebutuhan pembentukan negara modern dan dengan aspirasi dari kelompok minoritas. Kedua, adalah dengan membentuk negara yang benar-benar baru, berisikan komposisi etnis-etnis kecil secara setara dimana tidak ada etnis yang begitu dominan. Model etnis dominan dalam sebuah negara misalnya Malaysia, Pakistan, Mesir dan etnis setara adalah Tanzania (Keng dalam Gungwu (?): 97-98). Di Hindia Belanda, lebih condong untuk mengikuti model pertama, dimana Belanda mengkonstruksi Jawa sebagai “*the major ethnic core*” dan yang lainnya sebagai kawasan terluar. Hal ini disebabkan oleh Belanda menganggap Jawa sebagai kawasan kekuasaan sentral; Jawa adalah populasi terpadat dan pembangunan infrastruktur paling masif disebabkan pada abad-19 Jawa merupakan kawasan ekonomi yang utama. Pembangunan pendidikan Eropa pun lebih dipusatkan di wilayah Jawa daripada di Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera. Kenyataannya, sebelum dan setelah Islam hadir pun Jawa merupakan pusat kekuasaan politik di Nusantara.

Pada abad ke-19 saat prinsip nasionalitas menjadi sebuah prinsip politik utama negara-negara di Eropa, berkembanglah menurut David Landes bentuk imperialisme model baru menggantikan model imperialisme model lama. Aneksasi dan eksploitasi di beberapa negara Eropa mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Spanyol lebih kepada pencarian harta benda atau sesuatu yang berharga. Portugis di Asia, bekerja di wilayah yang dihuni oleh populasi yang padat dan bagi mereka, belum tertundukkan. Mereka membentuk *small, defensible holding* seperti Goa, dan dari sana mereka berbelanja, menjual dan memeras uang proteksi dari pedagang lokal (Landes, 1998: 425). Perubahan kemudian terjadi, imperialisme model baru yang terjadi setelah tahun 1860an, didasari pada rasionalitas dan *material interest* (Landes, 1998: 428). Tidak jauh berbeda dari Landes, Maarten Kuitenbrouwer yang mendefinisikan imperialisme sebagai “usaha mendirikan, formal atau informal, kontrol politik atas masyarakat lain”, berpendapat bahwa periodisasi imperialisme modern sebagai kategori historis dapat dinyatakan pada periode diantara tahun 1870-1914 (Tarling, 2001: 9). Para pemikir Marxis melihat relasi antara imperialisme negara Eropa di kawasan negara jajahan dalam perhubungannya dengan kapitalisme. Lenin melihat imperialisme yang mencapai puncaknya pada akhir abad ke-19 merupakan produk dari “*the highest stage of capitalism*”. Imperialisme adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk keberlanjutan dan kesejahteraan dari kapitalisme tingkat tinggi yang sangat membutuhkan material, tenaga kerja murah dan pasar bebas internasional. Pendapat ini dipengaruhi oleh analisis klasik J. A Hobson dalam *Imperialism: A Study* (1902) yang mengatakan bahwa “*the taproot of imperialism*” bukannya “kebanggaan nasional” tetapi keinginan dari “oligarki kapitalis” untuk mengembangkan kekuatannya melalui ekspansi imperial dengan mencari pasar baru dan membuka kesempatan investasi di tanah jajahan untuk mencari keuntungan luar biasa

daripada yang didapatkannya di negara induk (Hobson, 2005; Gallaher dan Robinson, 1953: 1-15).<sup>3</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh Hobson sebetulnya dikembangkan lebih jauh lagi melalui Immanuel Wallerstein. Wallerstein lebih melihat imperialisme dalam kerangka *world system theory* sebagai hubungan tidak berimbang antara *core* dan *periphery*, wilayah *periphery*, yang terbelakang tapi menyediakan apapun, mensuplai segala sesuatu untuk perkembangan perekonomian bagi *core*, wilayah pusat dengan teknologi dan ekonomi yang sedemikian maju (Wallerstein). Tapi Wallerstein begitu banyak dikritik karena cenderung menggeneralisir sebuah masalah. Bagaimanapun, imperialisme pada akhir abad ke-19 disebabkan oleh multikausal. Seperti misalnya, Bernard Cohen lebih melihat "*the taproot of imperialism*" adalah persoalan organisasional anarkis dari sistem negara internasional. Dalam pandangannya, logika imperialisme berhubungan dengan "pertahanan diri" dan "posisi" negara; hal itu berhubungan langsung dengan kompetisi tentang kedaulatan antar negara Eropa (Tarling, 2001: 10). Dalam konstelasi politik Eropa pada pertengahan abad ke-19 memang kita tidak bisa melepaskan diri dari kompetisi persaingan ekonomi. Imperialisme merupakan anak dari era kompetisi diantara persaingan industri – kapitalis ekonomi nasional dimana sebenarnya masih baru dan dipengaruhi oleh tekanan untuk mengamankan dan melindungi pasar pada periode ketidakpastian bisnis; pendeknya ini adalah era dimana tarif dan ekspansi menjadi permintaan yang umum diantara kelas berkuasa (Hobsbawm, 1989:

53). Perluasan ekspansi imperialis yang jarang dibahas juga disebabkan oleh ketakutan dari negara-negara imperialis untuk melindungi basis operasional ekonomi. Inggris misalnya mengekspansi wilayah Afrika demi melindungi rute dan wilayah maritim, untuk menuju pada wilayah-wilayah operasional ekonomi mereka.

Pada era 1875-1914 yang disebut oleh Hobsbawm sebagai "*the age of empire*" – yang merupakan konsekuensi dari imperialisme modern, hampir di seluruh dunia diluar Eropa dan Amerika, wilayahnya secara formal dibagi-bagi dalam beberapa teritori dibawah kekuasaan formal dan dominasi politik informal dari satu atau yang lain dari segelintir negara: terutama Kerajaan Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Belgia, AS dan Jepang. Dua wilayah utama di dunia seluruhnya dibagi-bagi: Afrika dan Pasifik. Tidak ada negara independen di wilayah Pasifik, pada waktu itu semuanya didistribusikan diantara Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, AS dan Jepang. Sampai tahun 1914, kecuali Etiopia, wilayah Afrika Barat yang tidak terlalu penting Liberia dan bagian wilayah Maroko yang masih melawan ditaklukan total, Afrika dimiliki seluruhnya oleh Inggris, Jerman, Perancis, Belgia, Portugis dan sedikit wilayah oleh Spanyol (Hobsbawm, 1989: 57-58). Di wilayah Asia, wilayah yang begitu luas beberapa wilayahnya tidak terlepas dari pendudukan, Inggris menguasai wilayah India, Burma dan membentuk kekuatan dalam zona berpengaruh di Tibet, Persia dan Teluk Persia, Rusia bergerak jauh ke Asia Tengah dan sedikit ke Siberia dan Manchuria – walaupun tidak terlalu sukses, Belanda di wilayah Indonesia. Perancis mendirikan kerajaannya di Indochina dan Jepang di wilayah Cina, Korea dan Taiwan. Pembagian wilayah-wilayah di dunia diantara kekuatan *super power*, merupakan ekspresi spektakular dari pertumbuhan divisi di dunia antara yang kuat dan yang lemah, yang maju dan yang tertinggal. Diantara tahun 1876-1915 seperempat wilayah dunia didistribusikan dan

3 Lihat J. A. Hobson, *Imperialism: A Study* (New York: Cosimo, 2005). Pendapat Hobson ini dibantah oleh John Gallagher dan Ronald Robinson pada artikelnya yang terkenal *The Imperialism of Free Trade* dalam *The Economic History Review* 6, No. 1 (1953), hal. 1-15. yang mengatakan bahwa Hobson terlalu menekankan pada *the role of formal empire* dan *directly ruled colonial possessions* serta menafikan signifikansi dari kekuatan perdagangan, pengaruh politik dan imperialisme informal.

diredistribusikan sebagai koloni-koloni oleh beberapa negara saja. Negara-negara tersebut sejak melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah tersebut, memiliki luas tanah yang naik drastis. Inggris misalnya luas wilayahnya naik sampai 4 juta mil persegi, Perancis naik 3,5 juta mil persegi, Jerman menambah 1 juta mil persegi serta Belgia dan Italia dibawah 1 juta mil persegi (Hobsbawm, 1989: 59).

Kolonialisme di wilayah jajahan menimbulkan berbagai konsekuensi, dari mulai positif sampai negatif dalam relasinya dengan konteks kelahiran nasionalisme dan gagasan kebangsaan. Kolonialisme menghadirkan perasaan berbeda antara pribumi dengan orang Eropa. Pencarian jati diri adalah implikasi tidak terhindarkan untuk mencari perbedaan-perbedaan yang akhirnya ditemukan. Kaum intelektual di negara jajahan menemukan perasaan berbeda dalam hal identitas: imajinasi sejarah, etnis, budaya, bahasa yang melahirkan solidaritas pemikiran bahwa “bangsa kita” berbeda dengan “bangsa kalian” (Reid, 2010). Pengikat-pengikat lainnya kemudian ditemukan seperti teritori selain sejarah yang sama, budaya, etnisitas, bahasa. Teritori dalam kasus ini adalah hal yang unik, seperti di Thailand menurut Thongchai Winichakul bahwa perasaan merasa sebagai bangsa dipengaruhi oleh apa yang disebutnya sebagai “*geo-body*” (Winichakul, 1994: 16).<sup>4</sup> Lewat pengetahuan tentang *geo-body* inilah pada studi kasus di Thailand misalnya, Thailand mengidentifikasi dirinya sebagai bangsa di wilayah perbatasan-perbatasan yang rumit, yang dibentuk oleh pengetahuan spasial. Di Indonesia dan negara Asia lain misalnya, pengetahuan tentang teritori ini membawa imajinasi pengikatan sebagai bangsa. Dalam beberapa hal, memang aspek-aspek tersebut mengabaikan akurasi dalam pandangan masa kini, misalnya identifikasi sejarah yang cenderung ahistoris, tapi itu

diperlukan dalam memobilisasi massa dan yang terpenting sebagai pembentuk identitas. Inilah sebab banyak pemikir yang mengatakan bahwa nasionalisme dan gagasan kebangsaan yang mengiringinya dibentuk oleh mitos-mitos daripada fakta-fakta.

Penemuan kompleks dari berbagai macam faktor yang melahirkan nasionalisme dan gagasan kebangsaan tidak kurang dan tidak lebih dipengaruhi efek dari modernitas yang dibawa oleh negara Eropa ke dalam wilayah kolonial. Modernisasi membawa perubahan dalam birokrasi ke arah rasional dan modern. Modernisasi membawa perubahan dalam teknologi dan pola hubungan komunikasi. Dan yang terpenting modernisasi membawa perubahan mentalitas dan pengetahuan melalui pendidikan. Pendidikan melahirkan kaum intelektual sebagai kelas baru yang berpengaruh dalam kemajuan bangsa di negara kolonial (van Niel, 2009). Modernisasi membawa pengaruh bagi penguasa pribumi untuk mengikuti model-model Barat, seperti di Thailand misalnya, dimana Raja Mongkut (1851-1868) dan Chulalongkorn (1868-1910) ingin mengkopi visi Barat dalam pembangunan. Meskipun modernisasi Barat membawa kekaguman beberapa kaum intelektual yang tercerahkan untuk memikri konsep tersebut, tapi kecenderungan general yang berjalan semakin banyak kaum terdidik tercerahkan dengan pengetahuan Barat semakin kritis dalam mempertanyakan identitas mereka dalam struktur negara kolonial (Tarling, 2004: 87). Bila dilihat dalam sebuah peta pergerakan nasionalisme di negara jajahan hampir sebagian besar kaum intelektual model ini mempunyai peranan penting dalam berkembangnya gerakan nasionalisme, seperti di beberapa negara Eropa Timur, India, China, Nigeria, Ghana, Vietnam, Filipina, Burma dan Indonesia. Tom Nairn yang melakukan studi mengenai relasi antara gerakan kaum intelektual dan kesadaran rakyat dalam proses nasionalisme dan bangsa melihat bahwa

4 *Geo body* adalah operasi teknologi teritorial yang menghasilkan kesadaran *nationhood*.

munculnya gerakan seperti ini diakibatkan tidak sampai pada tahap kapitalisme *per se* tetapi *uneven development* dari kapitalisme di negara kolonial (Nairn, 1977). Dalam karya fenomenalnya *The Break-up Britain*, Nairn menjelaskan maksudnya ini sebagai berikut:

Nasionalisme muncul dari pertemuan ketidakseimbangan antara *centre* dan *periphery*. Di sisi lain, penyebaran nasionalisme bisa berasal dari konsekuensi kelas dari difusi ketidakseimbangan kapitalisme. Kapitalisme mengarungi dunia, tendensinya mempengaruhi banyak wilayah dalam waktu yang berbeda, kecepatan dan intensitas, mengeksploitasi *periphery* dan cenderung mengharuskan ketidakberkembangan dan konsekuensinya para elite di tanah jajahan menghadapi superioritas masif dari kapitalis kolonial dalam teknologi, kekayaan, militer dan keahlian. Para elite di *periphery* tidak mempunyai kekuatan tandingan yang sepadan, satu-satunya harapan yang tersisa adalah pada rakyat banyak. Kaum nasionalis intelegensia baru inilah yang mengundang rakyat ke dalam sejarah, sehingga terbentuk pola hubungan khusus antara kaum intelegensia dan rakyat. Maka elemen pembentuk nasionalisme dalam pandangan Nairn adalah selain *uneven development* yaitu pembentukan kelompok militan, komunitas antar-kelas yang mempunyai kekuatan kesadaran – dalam beberapa hal dipengaruhi mitos – dalam takdir untuk berpisah berhadapan dengan kekuatan dominasi dari luar (Nairn, 1977: 101, 304).

Nairn sampai pada sebuah pernyataan bahwa takdir pemisahan tersebut disebabkan secara sederhana dalam hubungan dengan kolonialisme Eropa. Nairn berpendapat dalam prakteknya ada dua jenis nasionalisme yang terbentuk dalam hal ini di Asia dan Afrika (1) kewarganegaraan, pembentukan teritorial berdasarkan teritori kolonial dan pengalaman kolonial (2) etnik, asal-usul pembentukan berasal dari *pre-existing popular ethnic communities* yang bersaing dengan komunitas

etnik yang lain yang dipertajam oleh urbanisasi kolonial.

Di Eropa Timur, semenjak tahun 1870-1914 berkembang sebuah nasionalisme baru yang didasarkan pada basis etnis dan bahasa, beberapa grup kecil intelektual menegaskan bahwa bangsa mereka harus melepaskan diri dari *empire* dan membentuk negara independen, jenis nasionalisme yang berkembang "*ethno-linguistic nationalism*" (Hobsbawm, 1992: 102-103). Di India gerakan nasionalisme mendapatkan pengaruh kuat dari pemberontakan tahun 1857, yang membuat Inggris menerapkan kebijakan baru yang diberi nama *Government of India Act 1858*; membuat India berada dibawah langsung pemerintahan Inggris pusat, pemerintah Inggris membuat kebijakan untuk tidak memperluas tanah di wilayah kerajaan-kerajaan, menghormati para pangeran lokal dan menghargai toleransi beragama. Kesadaran politik semakin berkembang dengan terbentuk Indian National Congress tahun 1885 oleh sekitar tujuh puluhan kaum intelektual India yang berlatarbelakang pendidikan Barat. Organisasi ini bertransformasi menjadi organ nasionalisme penting di India setelah tahun 1900 dimana terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu militan dan moderat; militan lebih menekankan pada strategi revolusioner dan kegiatan paramiliter dan moderat, diisi kaum intelektual berpendidikan Barat lebih menekankan pada strategi nir-kekerasan. Di dalam organisasi ini berisi intelektual berpendidikan Barat yang membawa nasionalisme populer di kalangan rakyat India, seperti Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Moh. Ali Jinnah, Rajendra Prasad, Chakravarti Rajagopalachari.

Di Indochina, pendidikan model Barat yang diberikan Perancis berimplikasi pula terhadap pembangunan kesadaran tentang ke-Indochina-an – terdapat dua maksud tujuan dari kebijakan pendidikan (Anderson, 2004: 189). Pertama, kebijakan mempunyai maksud memperputus ikatan-ikatan politis kultural

yang ada pada rakyat jajahan dengan di luar Indochina. Kedua, hampir sama dengan negara kolonial lain yaitu bermaksud melahirkan orang pribumi yang bisa bicara, bahasa dan menulis Perancis dan bisa dimasukkan ke dalam institusi pemerintahan, menjadi sekutu politik tahu berterima kasih. Sekolah yang didirikan ini kemudian dialiri tulisan-tulisan reformer Tiongkok, tokoh nasionalis China seperti Sun Yat Sen dan pengetahuan tentang Revolusi Perancis oleh sekelompok elit intelektual yang tercerahkan. Pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa revolusioner besar dunia yang menghasilkan bangsa-bangsa baru juga yang membuat Nguyen Ai Quoc alias Ho Chi Minh mempunyai kesadaran dan spirit untuk membawa Vietnam menjadi negara mandiri. Ia membaca banyak buku mengenai pemikiran Thomas Jefferson dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika dalam pengembaraannya di Perancis (1919-1923). Bahkan di Perancis, Ho Chi Minh mendeklarasikan sebuah petisi agar Perancis keluar dari Vietnam dan mengakui hak asasi rakyat Vietnam dengan terpengaruh Deklarasi Kemerdekaan Amerika meskipun akhirnya tidak ditanggapi serius oleh negara-negara adidaya.

Para penggerak nasionalisme dan gagasan kebangsaan di negara jajahan seperti Asia Tenggara menunjukkan karakteristik selain mereka berasal dari kelas menengah terdidik tetapi mengambil “jalan menyimpang”, rata-rata mereka juga berusia muda saat menceburkan diri ke dalam pergerakan. Para intelegensia Filipina yang membayangkan gagasan kesamarataan Filipina dengan Spanyol, sekularisasi agama dan representasi di *Cortes Generales*, seperti Jose Rizal, Graciano Jaena, Marcelo H. Del Pilar yang dikenal sebagai para penggerak *second propaganda movement* di Eropa rata-rata masih berusia muda, terutama Jose Rizal. Rizal saat itu menulis *Noli Me Tangere* (1887) yang berpengaruh terhadap keidentitasan Filipina, masih berusia 26 tahun. Pada saat Rizal mendirikan La Liga Filipina,

tahun 1892 di Tondo, Manila, ia masih berusia 31 tahun. Selain itu, di Malaysia pada tahun 1938 didirikan organisasi Kesatuan Melayu Muda, cikal bakal nasionalisme Malaysia yang ingin menyatukan orang-orang Melayu tanpa melihat asal-usul dan memperjuangkan hak orang Melayu. Hal yang sama dijumpai pula di Burma, dimana tahun 1908 Young Men's Buddhist Association, meniru Young Men's Christian Association yang didirikan tahun 1844 di Inggris, didirikan oleh pemuda-pemuda sekolahan yang berbahasa Inggris (Anderson, 2004: 180-181), adalah asal-usul dari gerakan nasionalisme di Burma. Lalu, pada tahun 1930an, para kaum intelektual urban dari organisasi kampus terutama di Rangoon University dalam diskusi rahasianya sering mendebatkan mengenai “seberapa jauh kita harus bekerjasama dengan Inggris dan bersabar untuk melakukan reformasi” (Lockard, 2009: 142). Beberapa gerakan militan juga didirikan di universitas seperti salah satunya *thakins*, yang mempunyai pemikiran marxis dan ide sekularisasi yang kuat diketuai oleh Thankin Nu yang banyak menerjemahkan karya-karya Karl Marx. Gerakan-gerakan yang diorganisasi oleh pemuda ini di beberapa negara menurut Onghokham dipengaruhi oleh karakteristik yang serupa, karena negara-negara Asia pada abad ke-20 mengalami struktur perubahan yang sama; abad ke-20 melihat masuknya ide-ide baru, pendidikan, industrialisasi dalam batas tertentu, urbanisasi, disintegrasi masyarakat tradisional teknologi baru, dan sebagainya (Onghokham, 1977: 18-19).

### **Keterbatasan Boedi Oetomo**

Pada pertengahan abad ke-19, perubahan sistem ekonomi dari *culturstelsel* ke sistem liberalisme menunjukkan suatu wajah bahwa Hindia Belanda merupakan bagian dari sistem ekonomi pasar global. Meskipun ada sebab khusus yang menunjukkan kegagalan dari sistem tanam paksa periode akhir tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi sosial

dan politik yang memancing kegerahan para pemikir liberal untuk mencari sistem yang sesuai. Liberalisme ekonomi yang dimulai rencanakan pada gagasan reformasi tahun 1840an dan 1850an merubah sistem tanam paksa menjadi sebuah perubahan dalam pengorganisasian ekspor (1) bentuk tenaga kerja paksa mulai dihapuskan dan diganti dengan tenaga bayaran bebas (2) produksi gula secara bertahap ditransformasikan menjadi industri yang bertopang pada kontrak bebas dengan desa dan para petani, dan penanaman kopi – yang masih dikembangkan dengan paksaan (3) bentuk baru dari perkebunan komoditas ekspor (teh dan tembakau) dikembangkan melalui modal dan kewirausahaan Eropa (van Zanden dan Marks, 2012: 147-148). Pada periode 1860-70an merupakan sebuah era lahirnya rezim dimana para pengusaha swasta mengelola perkebunan besar dan pabrik gula dengan memakai tenaga kerja upahan dan tanah bebas. Tahun 1800-1880 penduduk Jawa telah naik drastis dari 7,5 juta jiwa menjadi 20 juta jiwa. Selama periode sesudah 1870, terjadi perubahan drastis dalam bagaimana cara Belanda mengeksploitasi wilayah Indonesia. Zanden dan Marks menganalisis bahwa “hubungan kolonial berubah selama periode Tanam Paksa, wilayah koloni melalui *batig slot* memberikan kontribusi besar bagi anggaran negara Belanda, namun biaya Perang Aceh yang membengkak mengakhiri suplai *batig slot* yang memang sudah menurun tajam sebelumnya” (van Zanden dan Marks, 2012: 158-159). Sejak tahun 1880an, negara kolonial meminjam sejumlah uang dari pasar modal Belanda, walaupun besarnya masih relatif kecil. Hindia Belanda menjadi tujuan penting dari investasi langsung di luar negeri, pada tahun 1900 dari 810 juta yang diinvestasikan di luar negeri, 750 juta diantaranya di Indonesia, pada tahun 1914 nilainya diperkirakan mencapai 1,68 triliun dari total investasi 2,27 triliun (van Zanden dan Marks, 2012: 159).

Dampak dari perubahan dalam kebijakan ekonomi, sistem birokrasi kolonial dirubah agar lebih modern, akurat dan efisien untuk menopang pembangunan negara kolonial. Perubahan ini terinspirasi oleh kritisisme kaum liberal dan sayap kiri terhadap rezim lama pengusung sistem tanam paksa yang lebih konservatif. Sistem birokrasi modern rasional ala Weberian diterapkan dan *cultuurprocenten* dihapuskan. Pengaruh sistem kolonial yang baru terhadap pemerintahan Jawa seringkali dihadapkan pada gagasan yang saling bertubrukan. Karena pemerintahan Jawa menurut Soemarsaid Moertono berada dalam kerangka *gusti-kawula*, dimana golongan yang memerintah mengatur seluruh masyarakat untuk kepentingan mereka dan rakyat sebenarnya menghormati dan kagum terhadap kesaktian raja bukan karena tunduk mutlak terhadap raja (Moertono, 1968; Anderson dalam Holt (ed.), 2007). Pemerintahan Jawa cenderung mengikuti pola tersebut daripada pola yang lebih rasional. Tapi dalam kerangka birokrasi negara kolonial, Sutherland mencatat Belanda sebenarnya menjadikan para priyayi Jawa sebagai agen, dari contoh kasus pada bupati-bupati Jawa yang masih memegang kekuasaan dalam sebuah jaringan “*interlocking elites*”, tapi lembaganya diperkuat oleh Belanda (Sutherland, 1974: 24).

Akselerasi perubahan di Hindia Belanda selanjutnya tidak bisa dilepaskan dari gagasan dan praktik dari politik etis. Konsep ini merupakan perdebatan yang terjadi antara kaum liberal dan konservatif untuk mencari kebijakan yang lebih sesuai diterapkan di negara kolonial. Pada pemilu 1901 Partai Liberal yang menguasai politik selama lima puluh tahun akhirnya dikalahkan dengan koalisi kelompok kanan dan agama, yang ingin membuat pemerintahan kembali pada prinsip-prinsip Kristen (van Niel, 2009: 55). Deklarasi September 1901 pada pidato tahunan Kerajaan Belanda memperlihatkan semangat Kristen tersebut ketika Ratu berpidato

untuk membantu rakyat Hindia Belanda sebagai kewajiban dan tanggung jawab moral. Menurut salah satu pemikir kebijakan etis, Th. van Deventer, pokok-pokok kebijakan untuk mempersiapkan *welfare state* berada dalam ranah irigasi, pendidikan, reforestisasi, perbaikan sistem kredit, kesehatan publik dan penyusunan kembali penduduk dari wilayah padat ke wilayah terluar yang masih sepi. Suzanne Moon yang melakukan studi mengenai pembangunan teknologi di Hindia Belanda awal abad ke-20, melihat kebijakan politik etis sebagai pertautan antara teknologi dan perluasan ekonomi. Irigasi dilakukan untuk meningkatkan hasil panen yang berarti kenaikan *income*, pendidikan termasuk sekolah pertanian untuk mempersiapkan sumberdaya terlatih dalam pertanian dan emigrasi merupakan kebijakan untuk menyebar praktik pertanian padi basah ke berbagai penjuru, dengan bantuan alat dari pemerintah dan pengerjaan irigasi (Moon, 2005: 200). Awal masa ini ditandai dengan semboyan kemajuan, seperti *vooruitgang*, *opheffing* (kemajuan), *ontwikkeling* (perkembangan), *opvoeding* (pendidikan) serta *bervoeding van welvaart* (memajukan kesejahteraan) (Siraishi, 1997: 35). Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial ini membuat terjadinya segregasi identitas dari para elite Jawa, yang sudah berkembang melalui pendidikan Barat. Peningkatan sekolah model Barat di Jawa pada awal abad ke-20 membuat surplus tenaga juru tulis atau administrator yang memang dibutuhkan Belanda untuk kebutuhan pegawai dalam administrasi dan perusahaan Barat (Furnivall, 1994: 404). Para politisi dari kebijakan etis sebenarnya mengharapkan bahwa pendidikan liberal dapat menyukseskan transformasi sosial masyarakat Indonesia, tapi konsep masyarakat modern yang mereka inginkan bukan berdasarkan Islam ataupun berdasarkan adat, namun masyarakat yang ter-Baratkan (Wertheim dan Gap, 1962: 240).

Jumlah besar dari orang berpendidikan Barat yang bekerja dalam administrasi kolonial dibawah manajemen Barat menjadi salah satu faktor yang memotong sistem kasta kolonial tahun 1900an. Pendidikan tinggi juga menjadi momok bagi stratifikasi tradisional di Jawa dengan munculnya kelas baru para “priyayi baru” yang tidak kurang memiliki status yang sama dengan para “priyayi lama” yang masih mendominasi pekerjaan dalam layanan masyarakat (Wertheim dan Gap, 1962: 241). Pada awal abad ke-20 menurut Sutherland, muncul sebuah gerakan dari kalangan intelegensia yang masih kecil jumlahnya dari kalangan priyayi, poin terpenting yang disuarakan adalah bahwa kepemimpinan tradisional mutunya sangat tidak memadai dan harus digantikan oleh priyayi yang lebih progresif yang memahami situasi baru yang dihadapi masyarakatnya (Sutherland, 1979: 58-60). Pada tahun 1906, Wahidin Soedirohusodo, dokter Jawa, saat mengelilingi Jawa mencari dana untuk beasiswa para mahasiswa dalam pendidikan, melihat pandangan alternatif dari para priyayi bukan ningrat untuk merubah keadaan. Sebaliknya para generasi lama yang ditemuinya tidak menampakkan antusiasme terhadap ide-ide darinya. Para mahasiswa STOVIA – yang ditemui oleh Wahidin – pada saat yang sama sedang mempersiapkan dasar persatuan dari ide-ide perubahan (Scherer, 1985: 54). Sebuah persatuan kemudian didirikan pada tahun 1908 bernama Boedi Oetomo (BO), atas dorongan dari Soetomo dan kawan sekolahnya Goenawan Mangoenkusumo dan Suradji Tirtonagoro, menghimbau priyayi bukan ningrat, birokratis rendah, guru-guru dan dokter Jawa untuk menuju kepada “kemajuan yang harmonis”. Menurut Savitri ideliasme BO ini “menggambarkan kenyataan bahwa andaikata bagi BO, masyarakat Jawa tahun 1908, tidak seserasi yang mereka harapkan, dan masyarakat itu berada dalam proses peralihan dan pembaharuan dalam nilai sosial dan kebudayaannya, keinginan keras dari para priyayi tersebut tidak merusak

keseimbangan sosial yang ada” (Scherer, 1985: 53). Beberapa program yang menjadi tujuan BO adalah bekerja untuk kepentingan pendidikan, bekerja untuk kemajuan pertanian, peternakan sapi dan perdagangan, bekerja demi kemajuan perindustrian, membangkitkan kebudayaan Jawa lama serta bekerja secara intensif mendukung ide humanisme secara general (Singh, 1961: 45).

Pada pembentukan awalnya Soewardi Soeryaningrat, Tjiptomangoenkusumo dan Saleh Sarwono bergabung. Sarwono, sekretaris cabang Batavia memberikan edaran menerangkan maksud dan tujuan persatuan bahwa “persatuan itu akan menjadi perintis terciptanya Persatuan Jawa Umum, tapi juga mengatakan bahwa dia ingin BO berkembang menjadi suatu persaudaraan tanpa perbedaan ras, jenis dan kepercayaan (Scherer, 1985: 54). Namun faktanya terjadi dikotomi antara golongan tua dan muda dalam tubuh organisasi ini, golongan tua masih menginginkan BO menjadi organisasi Jawa elitis sedangkan golongan muda yang lebih radikal menolak kebijakan seperti itu. Para golongan tua seperti Wahidin, Radjiman dan Dwijasewaya dalam perdebatan kongres pertama BO di Yogyakarta 1908, masih mengutamakan pentingnya pendidikan bagi priyayi Jawa bukan pendidikan desa secara umum. Wahidin bahkan memulai pidatonya dengan menekankan keagungan sejarah Jawa. Sedangkan Radjiman menyatakan bahwa pendidikan Barat sukar dimengerti orang Jawa. Dalam pandangan Nagazumi meskipun perhatian BO adalah pada kemunduran dan kemiskinan penduduk Jawa, tapi organisasi ini sebenarnya elitis yang percaya kepada “jika para elite Jawa menjadi terdidik, maka penduduk kebanyakan juga akan mengikuti” (Abdullah, 2009: 19). Sebaliknya para anggota yang lebih muda dan radikal seperti Tjiptomangoenkusumo yang sudah menjadi dokter di Demak, menginginkan BO menaruh perhatian bukan hanya pada pendidikan para priyayi Jawa saja tetapi

pendidikan seluruh penduduk Hindia Belanda. Tjipto juga menyingkinkan agar BO merubah dirinya menjadi organisasi politik agar lebih memudahkan menjalankan strategi organisasi. Dia menentang pendekatan kebudayaan yang rentan terhadap kompromi dan lemah pada pergerakan (Van Niel, 2009: 93). Kaum muda progresif yang ada dalam tubuh BO ini menjalankan fungsi intelektual yang disebut Karl Mannheim sebagai *die freischwebende intelligenz*, intelegensia tidak berdiri pada satu lapisan tertentu dalam masyarakat. Pengaruh kaum muda pada akhirnya tidak bisa menggoyang dominasi para golongan tua yang didukung oleh aristokrasi Jawa. Mereka akhirnya memilih keluar mencari jalan lain.

BO memang menampakkan kecenderungan sebagai perkumpulan intelektual yang menginginkan perubahan dalam masyarakat Jawa. Organisasi ini menurut Sartono Kartodirdjo menekankan pada *Javaansch Nationalisme*, suatu bentuk solidaritas atas kesamaan etnis dan kultural (Kartodirdjo, 1994: 204). Sedangkan Taufik Abdullah melihat corak “nasionalisme kultural” pada diri BO, yang emansipatoris, dan mencari landasan identitas pada keutuhan kultural (Abdullah, 2001: 31). Taufik Abdullah melihat bahwa kecenderungan ini merupakan “bagian usaha untuk menentukan identitas diri, ketika di satu pihak tarikan kolonial menjanjikan modernitas dan di pihak lain, keprihatinan terhadap kebanggaan kultural etnis sendiri... yang kini harus bernegosiasi dengan berbagai komunitas etnis lain, yang senasib” (*ibid.*). Namun, BO belum mendeskripsikan tentang gagasan bangsa Indonesia secara jelas maupun tradisional, jika dikatakan bahwa BO merupakan perintis nasionalisme Indonesia, dalam coraknya yang masih tradisional itu bisa dimaklumi. Tidak jauh dalam waktu pembentukan BO, di Hindia Belanda didirikan sebuah perkumpulan sosial kecil, para ningrat Jawa modernis, bernama Perhimpunan Hindia yang mempunyai tujuan memperjuangkan

kepentingan orang Hindia di Belanda tanpa melupakan penduduk pribumi Hindia Timur Belanda. Konsepsi tentang bangsa yang paling mengejutkan dari orang Indonesia pertama kali, justru datang dari surat kabar *Bintang Hindia* yang didirikan oleh Abdul Rivai bersama Brousson tahun 1902, dimana mereka memperkenalkan konsep baru bernama “bangsa Hindia” (Elson, 2008: 8).

### **Nasionalisme dan Gagasan Kebangsaan Trio Indische Partij**

Pada kenyatannya, pengaruh dari organisasi BO melandasi perselisihan di lingkungan priyayi Jawa yang memanas karena kesukaran dalam mengorganisasikan pandangan beranekaragam ke dalam satu corak yang sama. Tjipto dan Soewardi akhirnya keluar dan memilih bergabung dengan Indische Partij (IP) yang digerakkan oleh seorang Indo jurnalis *De Express*, Douwes Dekker, yang sedang mulai melakukan tur propaganda keliling Jawa tahun 1912. Tjipto bergabung di Surabaya bersama sekitar 70 orang lainnya dalam organisasi yang murni bersifat politik tersebut. Tjipto, seorang pahlawan yang melawan wabah penyakit pes dan dianugerahi bintang jasa oleh pemerintah Hindia, datang jauh-jauh dari Malang menemui kawan lamanya ini karena melihat kesamaan visi politiknya dengan Dekker (Tempo, 2012). Sedangkan Soewardi bergabung dengan IP karena Dekker kagum dengan tulisan-tulisan Soewardi di *De Express* dan *Oetoesan Hindia*. Pidato-pidato yang diberikan oleh Dekker untuk menarik massa dilakukan dalam *vergadering* besar yang saat itu merupakan sebuah hal baru di Hindia Belanda. Pada *vergadering* di Bandung, Douwes Dekker berpidato bahwa berdirinya IP merupakan “pernyataan perang, yaitu sinar yang terang melawan kegelapan, kebaikan melawan kejahatan, peradaban melawan tirani, budak pembayar pajak kolonial melawan negara pemungut pajak Belanda” (Siraishi, 1997: 79). Pidatonya yang berapi-api dengan mudah

menarik massa dalam jumlah besar. Dalam *vergadering* di Semarang 18 September 1912, sekitar 300 orang datang untuk mendengarkan pidato Douwes Dekker. Sampai dengan Oktober 2012, IP berhasil menjaring anggota sebanyak 7000an orang, sekitar 1000an orang bumiputera, dan mendirikan 30 cabang.

IP menurut Elson “jauh lebih penting bagi gagasan Indonesia ketimbang BO dan SI, serta organisasi yang muncul dari keduanya, seperti Jong Java yang setengah lintas-etnis, adalah upaya “satu jiwa yang romantis dan hidup” (Elson, 2008: 14). IP adalah organisasi pertama yang menyerukan “Hindia untuk Hindia”, kemerdekaan Hindia dari tangan Belanda (Siraishi, 1997: 78). Dekker mengatakan bahwa tujuan IP adalah mempersiapkan negara independen yang lepas dari subordinasi Belanda. Partai ini menurut Taufik Abdullah walaupun berusia tidak lama berhasil mengonsepsikan batas-batas sebagai komunitas-bangsa yang otentik. Konsepsi tentang “Hindia” dijelaskan partai ini sebagai orang-orang yang menetap di Hindia Belanda, *blijvers*, sedangkan para pegawai kolonial dan orang Eropa dilabelkan sebagai *trekkers*, orang asing kelas penguasa yang bolak-balik ke negara induk. Pada dasarnya gagasan integrasi bangsa yang muncul dari para pemikir Indische Partij merupakan konsepsi bangsa yang muncul secara politis seperti yang terjadi di Eropa Barat pada pertengahan 1800an akibat dari prinsip nasionalitas baru yang didasari oleh patriotisme terhadap tanah air. Nasionalisme IP meminjam istilah Anthony Reid adalah nasionalisme anti-imperial, sebuah nasionalisme yang memang didasari pada solidaritas bersama atas penindasan dari kolonialisme. Ini berbeda dari nasionalisme BO yang cenderung lebih bersifat nasionalisme etnis ataupun kultural yang mengabaikan aspek-aspek politis.

Douwes Dekker melakukan pembayangan akan sebuah komunitas berbayang yang didasari oleh “konsep-konsep masyarakat

Hindia sebagai kesatuan secara politis dan bukan secara geografis dan ketundukan politis” (Elson, 2008: 14). Douwes Dekker menurut Elson merupakan pemikir nasionalis yang “mengkonsepsikan bahwa gagasan bangsa Indonesia bukanlah kesatuan yang dibangun atas solidaritas etnis atau ras, keagamaan atau bahkan kedekatan geografis tetapi karena rasa kesamaan pengalaman dan solidaritas khusus yang mengalir darinya” (Elson, 2008: 15). Kebenciannya terhadap kolonialisme dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya mengikuti Perang Boer tahun 1899 di Afrika Selatan yang sering dituliskannya pada surat-suratnya yang dikirim ke Batavia kemudian diterbitkan pada *Bataviaasch Nieuwsblad*. Bersatunya rakyat dalam pandangan Dekker tidak begitu relevan jika masih adanya stratifikasi ras, budaya dan moralitas agama. Apa yang diimpikannya adalah kesetaraan sekuler yang tidak memandang perbedaan ras, agama, budaya. Austria-Hongaria, Swiss dan Amerika Serikat merupakan contoh-contoh yang dapat menerjemahkan pemikiran Dekker ini, negara tersebut menurutnya “banyak perbedaan bisa hidup dalam kesatuan negara yang transeden” (Elson, 2008: 18-19). Pengaruh kultural gerakan teosofi yang memandang penduduk Hindia Belanda secara *equal* secara signifikan mempengaruhi pemikirannya, walaupun secara politik bersebrangan dengan teosofi. Pandangan politik Dekker yang begitu radikal dipengaruhi oleh karena dia lebih mengutamakan propaganda politik daripada ideologi politik. Seperti kritik Sneevliet kepadanya yang mengatakan bahwa Dekker membuat gerakan politik tanpa teori, atau teorinya bersifat samar, lebih menekankan pada praksis (Schwidder dalam Tempo, 2012).

Berbeda dengan Dekker, Tjiptomanoenkusumo walaupun orang yang sama-sama menginginkan terciptanya persatuan, masih menganggap bahwa persatuan antara kaum pribumi dengan Belanda adalah suatu hal yang membawa

kemajuan. Radikalisme Tjipto yang disebut Sjahrir sebagai “bentuk yang paling aman”, pada artikelnya *Eenheid* (Persatuan), menekankan pada “persatuan masyarakat Hindia Timur”, yaitu penggabungan unsur-unsur Barat dan Timur sebagai faktor penting dalam menjamin pertumbuhan subur bagi negara dan rakyatnya (Scherer, 1985: 149). Persatuan menurutnya tidak mesti memerlukan keseragaman sebagai sebuah prasyarat. Yang diperlukan bagi masing-masing baik pribumi maupun Eropa adalah saling menghormati dan mengerti. Apabila keadaan ini dapat tercapai maka akan tercipta masyarakat baru yang bersatu tanpa membedakan derajat. Menurut Savitri “berdasarkan analisis Tjipto terhadap situasi dunia saat itu, Tjipto melihat hanya melalui perjuangan dalam menciptakan penyatuan dengan Belanda, keadaan-keadaan Hindia dapat dimodernisasikan” (Scherer, 1985: 151). Dengan sudut pandang evolusioner, negara Hindia menurut Tjipto adalah penyempingan budaya-budaya dari berbagai suku, seperti yang dialami orang Friesen agar menjadi kesatuan politik Belanda dan orang Bayern agar diterima negara Jerman (Elson, 2008: 16). Gagasan keseimbangan dan kesetaraan antara Belanda dan pribumi ini dianggap Belanda sebagai gagasan revolusioner radikal yang merendahkan keunggulan Belanda dan dianggap berbahaya untuk diterapkan.

Para pemikir IP mempunyai kesamaan dalam melihat bangsa dalam relasinya dengan *glorious past*. Seperti Dekker yang melihat bahwa Hindia Belanda adalah sebuah tanah yang gemilang dahulu makmur, bebas, damai sebelum kolonialisme merampas semua hal itu. Ataupun Tjiptomangoenkusumo yang mengatakan bahwa adalah “tugas suci untuk mengembalikan bangsa kita yang tengah terpuruk, dan kalau mungkin mendirikan kembali Kerajaan Hindia yang merdeka, versi baru dari Kerajaan Majapahit, tapi tanpa dipimpin oleh satu orang atau keluarga” (Elson, 2008: 14). Tjipto memang membenci tradisi

feodal dari aristokrasi Jawa, tatacara sembah sujud misalnya menurutnya adalah tradisi merendahkan martabat orang Jawa. Dia pernah membuat geram Hadiningrat, Bupati Demak, saat ia mengendarai kereta dengan dua kuda, suatu hak yang hanya diperoleh oleh *regent* dan keluarganya. Kemudian, saat bertugas di Surakarta dia berlatih kuda di lapangan alun-alun, yang sebenarnya hanya boleh dilakukan oleh keluarga Keraton. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Dekker dan Tjipto, seperti yang dikatakan oleh Tom Nairn tentang “kaum intelegensia yang membawa rakyat masuk ke dalam sejarah” atau Anthony Smith tentang “arkeolog politik yang merediskoveri dan mengkonstruksi kembali sejarah demi komunitas”. Disinilah propaganda nasionalisme membangun imajinasi tentang bangsa melalui salah satu elemennya “menemukan kembali kegemilangan sejarah atau menciptakan mitos baru”.

Revolusionernya pemikiran IP pada rentang waktu 1912-1913 mungkin tercermin dalam tindakan yang dilakukan oleh Soewardi Suryaningrat saat menulis artikel “*Als ik een Nederlander was*”. Soewardi meskipun secara status sosial adalah keturunan bangsawan, ayahnya adalah Pangeran Suryaningrat putra sulung Pakualam III, tapi dibandingkan dengan pangeran-pangeran lain ayahnya termasuk relatif miskin karena pengalihan kekuasaan kerajaan kepada Pakualam V. Soewardi tidak menjadi salah satu dari para pangeran kelompok putra kepala yang memerintah. Karenanya Soewardi hidup tidak terlalu menikmati hak istimewanya di tengah-tengah lingkungan istana. Meskipun demikian, Soewardi masih memiliki status sebagai aristokrat yang dipandang oleh Belanda mempunyai pengaruh yang lebih membahayakan daripada para priyayi rendahan seperti Tjiptomangoenkusumo. Hal inilah yang menambah kegemparan bukan hanya kalangan pribumi tapi kalangan Belanda saat tahu bahwa penulis artikel “Jika Saya

Seorang Belanda” adalah Soewardi. Sehingga Soewardi dihukum lebih keras daripada yang seharusnya. Sebaliknya, para priyayi Jawa tidak habis pikir kenapa Soewardi yang seorang pangeran menuliskan hal yang janggal seperti itu, seolah-olah ia merupakan turunan dari keluarga yang integritasnya meragukan (Scherer, 1985: 92).

“Jika Saya Seorang Belanda” yang ditulis di harian *De Express* merupakan artikel yang membuat pemerintah Belanda merah padam. Sifat dasar eksplosif tulisan ini “bukan semata-mata karena nada provokatifnya melainkan implikasi-implikasi politiknya yang lebih luas karena diterjemahkan dalam Bahasa Melayu dan diedarkan sehingga memungkinkan orang yang tidak dapat berbahasa Belanda membacanya” (Scherer, 1985: 90). Artikel itu merupakan publikasi pertama cendekiawan Indonesia yang mengkritik pemerintah kolonial dengan keras sekali apalagi momennya bertepatan dengan perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda. Dalam artikelnya Soewardi mengatakan bahwa menyelenggarakan perayaan kemerdekaan di Hindia Belanda tidaklah adil di tengah tanah yang penduduknya belum mendapatkan kemerdekaan. “Peristiwa ini (perayaan kemerdekaan) sendiri adalah cukup melambangkan perasaan patriotik Belanda, dan cinta kepada bangsa yang telah dilukiskan melalui kepahlawanan ... Betapa riang, betapa senang bila mampu merayakan suatu hari nasional yang penting seperti itu! ... Tetapi nyatanya tidak begitu. Jika saya seorang Belanda saya tidak akan mampu melakukan apa pun. Sesungguhnya saya inginkan perayaan kemerdekaan mendatang itu dihormati seluas mungkin, tetapi saya tidak izinkan penduduk negara ini mengikuti pesta itu” (Suryaningrat dalam Scherer, 1985: 314-315). Dari perasaan prihatin atas penjajahan yang masih ada ditengah-tengah bangsanya sendiri, Soewardi membalikkan harapan yang dirasakan oleh orang Belanda agar

menjadi semangat bagi pribumi untuk bisa memerdekakan diri dikemudian hari. Soewardi berkata “harapan mereka sedang dibangkitkan, secara tidak sadar kita membangunkan keinginan-keinginan dan cita-cita mereka untuk kemerdekaan (kita) di masa mendatang. Tanpa sengaja kita berseru kepada mereka: kami merayakan kemerdekaan kami, kami cinta kemerdekaan, sesungguhnya adalah untuk kebahagiaan itu maka rakyat perlu merdeka, bebas dari segala macam penindasan” (Suryaningrat dalam Scherer, 1985: 316).

Akibat dari tulisan ini trio IP didakwa tuduhan “penyimpangan dalam jurnalistik”. Tapi sebetulnya pemerintah kolonial takut terhadap tindakan revolusioner dari trio IP yang semakin radikal dalam kancah politik. Sudah jelas bahwa kebangkitan kesadaran nasional atas dominasi asing dalam artikel Soewardi bisa memancing para intelektual untuk melakukan hal yang sama. Setelah sebelumnya izin mendirikan IP ditolak pemerintah Belanda atas kekhawatirannya terhadap organisasi ini, ketiga penggerak utama IP ini akhirnya dibuang ke Belanda. Dalam sebuah pembelaan terhadap tindakan Belanda kepada Soewardi, Dekker sempat berbicara bahwa “kita Bangsa Hindia tidak juga bersebelahan satu sama lain, melainkan bersatu, serentak semuanya menjadi begitu tajam dan jelas bagi kita: kita bersaudara, kita adalah satu” (Elson, 2008: 18).

## Penutup

Taufik Abdullah mendeskripsikan IP sebagai organisasi “terlalu idealistis dan terlalu modern pada masanya”, hal ini didasari atas dasar konsepsi IP dalam menjelaskan apa yang disebutnya sebagai “bangsa Hindia” (Abdullah, 2009: 22). Walaupun pada masa IP, ketiga pemikir yang melampaui zamannya itu belum memberikan penjelasan terhadap gagasan bangsa secara jelas dan modern seperti yang kita pahami saat ini, tapi gagasan

yang dicetuskan mereka adalah peletak dasar perdebatan intelektual tentang bangsa dalam ranah politik. Setelah gebrakan IP yang cukup singkat tersebut, dalam pembuangan, tiga serangkai tidak tinggal diam malahan mereka menggelorakan pandangan anti kolonialisme di tanah induk. Saat pertama kali datang ke Belanda, mereka justru disambut oleh puluhan kader dari Partai Buruh Belanda yang simpatik dengan perjuangan IP. Pada akhir tahun 1913, tiga serangkai ini seringkali diundang memberikan pidato dan menghadiri konferensi Partai Buruh Belanda dan organisasi mahasiswa Indonesia yang berada di Belanda, seperti *Indische Vereeniging* (IV).

Justru pada pembuangan inilah gagasan Indonesia menurut Elson muncul pertama kali berkat penerbitan *Hindia Poetra* (HP) yang diterbitkan oleh IV tahun 1916, yang redaksinya dikepalai oleh Soewardi. Sebelumnya IV adalah organisasi asosiasionis saat dipimpin oleh Noto Soeroto, seorang cucu Pakualam V, menolak pandangan tiga serangkai yang menurutnya “menghasut dan tidak mendukung gagasan bersama”. Pandangan ini berangsur-angsur berubah ketika IV diketuai oleh Sam Ratulangie. Dalam halaman-halaman HP, Soewardi yang pertama kali menggunakan kata “Indonesia” (Elson, 2008: 25). Saat HP mengalami masa sulit tahun 1918, HP dihidupkan kembali oleh *Indonesisch Verbond van Studeerenden* (IVS), Perkumpulan Mahasiswa Indonesia, sebuah perkumpulan lintas etnis mahasiswa Indologi yang terdiri dari 14 organisasi dan 668 anggota. Setelah HP dibawah IVS ini penggunaan istilah Indonesia telah diterima luas oleh kalangan mahasiswa Indonesia di Belanda. Dalam terbitan HP selanjutnya, Agustus 1918, Soewardi terpengaruh oleh gagasan lama IP berbicara tentang “orang Hindia atau Indonesia adalah siapa saja yang menganggap Hindia atau Indonesia sebagai tanah airnya, tanpa peduli apakah dia orang Indonesia totok atau keturunan Tionghoa, Belanda atau Eropa, siapa pun warga negara Indonesia adalah

orang Indonesia”. Begitulah pemikiran para orang terbuang ini mempengaruhi gagasan kebangsaan di tanah jajahan maupun di negara induk. Gagasan mereka secara langsung mem-paving kemunculan gagasan Indonesia yang lebih modern pada tahun 1920an, yang berpuncak pada dua ide besar, yaitu Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia 1925 dan Sumpah Pemuda 1928.

### Daftar Pustaka

- (1998). *Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent Theories of Nations and Nationalism*. London: Routledge.
- (2003). *Nasionalisme: Teori, Ideologi dan Sejarah*. Jakarta: Erlangga
- “Tur Propaganda di Tanah Jawa,” dalam *Tempo* (edisi khusus Douwes Dekker), 20-26 Agustus 2012.
- Abdullah, Taufik (2009). *Indonesia: Towards Democracy*. Singapore: ISEAS.
- Anderson, Benedict (2007). “The Idea of Power in Javanese Culture,” dalam Claire Holt (ed), *Culture and Politics in Indonesia*. Jakarta: Equinox.
- Anderson, Benedict (2008), *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Berbayang*. Yogyakarta: Insist Press.
- Bayly, Christopher (2004). *The Birth of Modern World 1780-1914: Global Connections and Comparisons*. Oxford: Blackwell.
- Dann, Otto dan Dinwiddy, John (eds), (1988). *Nationalism in the Age of the French Revolution*. London: Hambledon Press.
- Elson, Robert. (2008). *The Idea of Indonesia: A History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Furnivall, J. S. (1948). *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India*. Cambridge: Cambridge University Press, 1948.
- Gallagher, John dan Ronald Robinson (1953), “The Imperialism of Free Trade” dalam *The Economic History Review* 6, No. 1: 1-15
- Gellner, Ernest (1964). *Thought and Change*. London: Weidenfeld and Nicolson.
- Gellner, Ernest (1983). *Nations and Nationalism*. Oxford: Basil Blackwell.
- Hobsbawm, Eric dan Ranger, Terence (eds), (1983). *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hobsbawm, Eric (1989). *The Age of Empire 1875-1914*. New York: Vintage Books.
- Hobsbawm, Eric (1992). *Nations and Nationalism since 1780: Myth, Program and Reality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hobson, J. A. (2005). *Imperialism: A Study*. New York: Cosimo.
- Keng, Cheah Bong (2005), “Ethnicity in the Making of Malaysia,” dalam Wang Gungwu (ed), *Nation-Building. Five Southeast Asian Histories*, Singapore: ISEAS.
- Landes, David (1998). *The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor*. New York: W. W Norton & Company Inc.
- Lockard, Craig A. (2009). *Southeast Asia in World History*, New York: Oxford University Press.
- Miller, David (1995). *On Nationality*. New York: Oxford University Press.
- Moertono Soemarsaid (1968), *State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century* (Ithaca: Cornell University Modern Indonesian Project.
- Moon, Suzanne (2005). “The Emergence of Technological Development and the Question of Native Identity in Netherlands East Indies,” dalam *Journal of Southeast Asian Studies* 36, No.2
- Nairn, Tom (1977). *The Break-up of Britain: Crisis and Neo-Nationalism*. London: New Left Books.
- Niel, Robert van (2009). *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Nodia, G.O. (1992). “Nationalism and Democracy,” dalam *Journal of Democracy* 3, No. 4: 3-21.
- Ongkhokham (1977). “Angkatan Muda dalam Sejarah dan Politik,” dalam *Prisma*, No. 12:

- Reid, Anthony (2010), *Imperial Alchemy: Nationalism and Political Identity in Southeast Asia*, Cambridge: Cambridge University Press,.
- Reid, Anthony (2005), "Writing the History of Independent Indonesia" dalam Wang Gungwu (ed), *Nation-Building. Five Southeast Asian Histories*, Singapore: ISEAS.
- Sartono Kartodirjo (1994). *Pembangunan Bangsa*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Scherer, Savitri (1985). *Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-Pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Schwidder, Emile, "Antara Douwes Dekker dan Henk Sneevliet," (2012) dalam *Tempo*.
- Shiraishi, Takashi (1997). *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926* Jakarta: Grafiti.
- Singh, Vishal (1961). "The Rise of Indonesian Political Parties," dalam *Journal of Southeast Asian History* 2, No. 2
- Smith, Anthony D. (1994). "Gastronomy or Geology? The Role of Nationalism in the Reconstruction of Nations," dalam *Nations and Nationalism* 1, No. 1: 3-23.
- Soewardi Suryaningrat, "Sekiranya Saya Seorang Belanda," lampiran dalam Savitri Scherer, *Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-Pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985).
- Sutherland, Heather (1974) "Notes on Java's Regent Families: Part II," dalam *Indonesia* 17: 1-42.
- Sutherland, Heather. (1979). *The Making of a Bureaucratic Elite: The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi*. Singapura: Heinemann.
- Tarling, Nicholas (2001). *Imperialism in Southeast Asia: 'A Fleeting, Passing Phase'*. London dan New York: Routledge.
- Tarling, Nicholas (2004). *Nationalism in Southeast Asia: 'If the People Are With Us'*. London dan New York: RoutledgeCurzon.
- Tilly, Charles (1975). "Reflections on the History of European State-Making," dalam Charles Tilly (ed), *The Formation of National States in Western Europe*. New Jersey: Princenton University Press.
- Wallerstein, Immanuel (1974). *The Modern World System: Capitalist Agriculture and the Origin of the European World Economy in the Sixteenth Century* (Vol.1) dan *The Modern World System: Centrist Liberalism Triumphant, 1789-1914* (Vol.4)
- Wertheim, W. F. dan Gap, The Siau. (1962). "Social Change in Java 1900-1930," dalam *Pacific Affairs* 35, No. 2
- Winichakul, Thongchai (1994). *Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation*. Chiang Mai: Silkwoem Books.
- Zanden, Jan Luiten van dan Daan Marks (2012). *Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan*. Jakarta: Gramedia

